

RINGKASAN

WENDY
YUHFRIZAL
217410102022

Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Jarimah
Pemeriksaan (Analisis Putusan Nomor
2/JN/2023/MS.MRD)

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya implementasi hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemeriksaan dalam sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2023/MS.MRD, yang mencantumkan restitusi secara umum tanpa menjelaskan besaran nominal, batas waktu pelaksanaan, maupun prosedur yang harus ditempuh. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang menghambat proses pemulihan secara komprehensif bagi para korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemeriksaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd), menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemeriksaan tersebut, dan menganalisis upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemeriksaan putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd

Jenis Penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deduktif, deskriptif analitik, dan preskriptif

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemeriksaan putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd belum memberikan rincian teknis terkait pelaksanaan restitusi sehingga menunjukkan pertimbangan hakim masih lemah dari sisi kejelasan administratif dan eksekusi konkret, sehingga belum menjamin kepastian pelaksanaan restitusi hak anak korban. Hambatan dalam pelaksanaan restitusi masih terdapat pada sisi regulasi yang tidak sinkron, keterbatasan lembaga pelaksana, hingga kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam melaksanakan restitusi tersebut. Upaya yang diperlukan dalam pemenuhan hak restitusi anak korban yaitu dengan penguatan kerangka hukum, keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga yang berwenang, serta harmonisasi antara peraturan nasional dan qanun Aceh untuk menjamin hak restitusi bagi anak korban jarimah pemeriksaan dapat direalisasikan secara efektif.

Disarankan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mengintegrasikan pedoman teknis yang lebih jelas dalam putusan terkait restitusi. Disarankan Lembaga perlindungan anak dan LPSK di Aceh untuk menginisiasi program pendampingan secara komprehensif bagi anak korban tindak. Disarankan penguatan kerangka hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi pada korban

Kata Kunci: Hak Restitusi; Anak; Jarimah; Pemeriksaan

SUMMARY

WENDY
YUHFRIZAL
217410102022

The Right to Restitution for Child Victims of Rape
Crimes (Analysis of Decision Number
2/JN/2023/MS.MRD)

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum and Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

This research is motivated by the suboptimal implementation of the right to restitution for child rape victims within the Sharia Court justice system in Aceh. This is evident in the Meureudu Sharia Court Decision Number 2/JN/2023/MS.MRD, which outlines restitution in general terms without specifying the amount, implementation deadline, or procedures. Consequently, legal uncertainty has arisen, hindering the comprehensive recovery process for victims.

The purpose of this study is to analyze the judge's considerations in fulfilling the restitution rights of child victims of rape (analysis of decision number 2/JN/2023/Ms.Mrd), analyze the obstacles to implementing the restitution rights of child victims of rape, and analyze efforts to fulfill the restitution rights of child victims of rape in decision number 2/JN/2023/Ms.Mrd.

This thesis is a normative juridical research. The research approach uses a case study and legislation approach. The data used in this study is secondary data. The data collection techniques used in this thesis are library research and document study. Data analysis is conducted deductively, descriptively, analytically, and prescriptively.

The results of the study found that the judge's considerations in fulfilling the restitution rights of child victims of rape crimes in decision number 2/JN/2023/Ms.Mrd have not provided technical details regarding the implementation of restitution, thus indicating that the judge's considerations are still weak in terms of administrative clarity and concrete execution, so that they do not guarantee the certainty of the implementation of restitution of child victims' rights. Obstacles in the implementation of restitution still exist on the side of unsynchronized regulations, limitations of implementing institutions, and a lack of understanding of law enforcement officers in implementing the restitution. Efforts needed to fulfill the restitution rights of child victims include strengthening the legal framework, active involvement of authorized institutions, and harmonization between national regulations and Aceh qanun to ensure that the right to restitution for child victims of rape can be realized effectively.

It is recommended that judges' considerations in issuing decisions incorporate clearer technical guidelines regarding restitution. It is recommended that child protection agencies and the LPSK in Aceh initiate comprehensive support programs for child victims of crime. It is recommended that the legal framework for implementing restitution for victims be strengthened.

Keywords: Right to Restitution; Children; Crime; Rape